



**PENGARUH KEBIJAKAN PERALIHAN SYSTEM KERJA TERHADAP
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA BALAI PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
SULAWESI TENGGARA**

Zuci Rahmani Zainal, Muh. Akmal Ibrahim, Nurdin Nara

Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

Abstrak

Virus corona ditemukan pertama kali di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona Presiden Indonesia mengeluarkan instruksi dengan dikeluarkannya surat edaran Menteri PAN-RB No.19 Tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan didukung keputusan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 mengenai perpanjangan status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia. Dengan adanya instruksi tersebut penelitian ini akan membahas pengaruh kebijakan peralihan system kerja bagi kinerja aparatur sipil Negara di balai pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat Sulawesi Tenggara. Penelitian ini memperoleh data dari hasil wawancara, observasi serta studi pustaka yang diolah dengan menggunakan metode analisis penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan peralihan system kerja bagi kinerja aparatur sipil Negara di BP-PAUD & Dikmas Sultra tidak memberikan pengaruh yang cukup besar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pemberian mutu pendidikan karena aparatur sipil Negara mampu melampaui target yang telah ditentukan meskipun harus bekerja dari rumah.

Kata Kunci: Kebijakan, Bekerja dari rumah, BP-PAUD & Dikmas Sultra

PENDAHULUAN

Wabah virus baru yang corona atau lebih dikenal dengan covid-19 membawa pengaruh besar terhadap system tatanan kerja pemerintah. Virus corona pertama kali ditemukan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Dalam proses pencegahan dan penyebaran virus ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengeluarkan surat edaran Menteri PAN-RB No.19 Tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdasar atas instruksi Presiden Indonesia. Selain dalam upaya pencegahan penyebaran virus covid-19, surat tersebut juga mengatur pedoman pelaksanaan tugas kedinasan instansi pemerintahan ketika bekerja dari rumah agar pelaksanaan pelayanan public tetap berjalan efektif.

Adanya kebijakan peralihan system kerja ini juga didukung keputusan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 mengenai perpanjangan status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia.

Menindak lanjuti surat edaran Menteri PAN-RB dan juga keputusan kepala BNPB, Balai pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat Sulawesi Tenggara (BP-PAUD & Dikmas Sultra) sebagai lembaga vertikalisasi kementerian pendidikan juga ikut melaksanakan penyesuaian system kerja. Peralihan system kerja bekerja dari rumah mulai dilaksanakan di BP-PAUD & Dikmas Sultra pada tanggal 20 Maret 2020 melalui surat tugas yang dikeluarkan kepala kantor BP-PAUD & Dikmas Sultra. Terdapat empat puluh aparat sipil Negara yang bertugas dalam melaksanakan tugas pemerintahan dalam hal melaksanakan pengembangan program dan juga mutu pendidikan anak usia dini serta

pendidikan masyarakat. Dikarenakan kondisi penyebaran covid yang terus meningkat dan juga adanya ASN BP-PAUD & Dikmas Sultra yang terinfeksi virus tersebut membuat instansi tersebut memperpanjang masa bekerja dari rumah dengan dikeluarkannya surat tugas kedua pada tanggal 23 Desember 2020.

Kebijakan Penyesuaian system kerja yang mendadak ini tentu saja memerlukan berbagai hal demi tercapainya tujuan bersama yang telah ditentukan meskipun harus bekerja dari rumah. Kebijakan sendiri ialah serangkaian tindakan/kegiatan yang dikeluarkan oleh seseorang, pemerintah maupun kelompok sebuah lingkungan yang dimana bisa saja terdapat adanya hambatan-hambatan atau kesempatan dalam mencapai tujuan tertentu.

Sebagai aparat sipil Negara BP-PAUD & Dikmas Sultra yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan pengembangan kualitas pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat meskipun harus bekerja dari rumah harus mampu memberikan pelayanan yang sama seperti saat bekerja dari kantor. Namun dalam pelaksanaannya tentu saja tidak luput dari hambatan dan juga masalah-masalah yang dihadapi dalam menjalankan tugas sebagai aparat sipil Negara yang secara tidak langsung memberikan dampak terhadap proses komunikasi, koordinasi, dan proses pencapaian tujuan. Untuk itu diperlukan berbagai hal pula dalam proses adaptasinya agar kinerja pegawai selama masa bekerja dari rumah dapat dijalankan secara efektif dan efisien.

RUMUSAN MASALAH

Dari pemaparan latar belakang dapat ditentukan rumusan masalah mengenai penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan peralihan system

- kerja bekerja dari rumah di BP-PAUD & Dikmas Sultra ?
2. Apa Pengaruh bekerja dari rumah bagi kinerja aparatur sipil Negara di BP-PAUD & Dikmas Sultra?
 3. Apa saja factor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan bekerja dari rumah di BP-PAUD & Dikmas Sultra?

KAJIAN LITERATUR

Dalam literatur ilmu politik tradisional kebijakan public diartikan berbeda-beda oleh para alumni ilmu politik. Kata kebijakan berarti sekumpulan konsep yang menjadi dasar sebuah rencana pelaksanaan peerjaan dalam mencapai tujuan. Publik dalam arti sempit merupakan sekumpulan orang-orang yang terikat dalam suatu ikatan kebersamaan disebuah wilayah tertentu serta memiliki minat dan tujuan yang sama. Menurut James Anderson (1984:3) kebijakan public merupakan sebuah kegiatan dengan maksud dan tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang memiliki hubungan dengan suatu masalah yang perlu diperhatikan. Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (1973:265) juga mengemukakan bhawa kebijakan public merupakan suatu keputusan yang tetap bercirikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari orang-orang yang membuat dan bagi orang-orang yang akan mematuhi keputusan itu.

Berdasarkan definisi dan pemikiran diatas disimpulkan bahwa kebijakan public adalah aturan yang diformulasikan oleh actor public dan menjadi sebuah dasar dalam mengambil tindakan dengan maksud dan tujuan tertentu dimana didalamnya masih ditemukan adanya hambatan maupun kesempatan dalam mencapai sebuah tujuan. Dari hal tersebut, kebijakan peralihan system kerja yang dikeluarkan

pemerintah berdasarkan instruksi Presiden Indonesia dalam upaya mengurangi penyebaran virus covid-19 dalam ruang lingkup instansi pemerintahan tidak luput dari sebuah hambatan dan juga kesempatan dalam pencapaian tujuan instansi dan tentu saja peralihan system kerja ini akan mempengaruhi kinerja dari para aparatur sipil Negara sebagai actor dalam pemberian pelayanan public.

Peralihan system kerja ini mengatur pedoman para aparatur sipil Negara dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah sama halnya dengan bekerja jarak jauh tanpa adanya kegiatan dikantor bahkan untuk bertemu dengan pegawai lainnya. Bekerja dari rumah sudah ada sejak lama dan diperkenalkan pertama kali oleh Norbert Wiener di Eropa tahun 1950 dengan istilah *telework* atau *telecommute* (Oswar Mungkasa, 2020).

Bekerja dari rumah merupakan hal yang baru dalam system tatanan kerja di Indonesia dan mulai diberlakukan sejak dikeluarkannya surat edaran Menteri PAN-RB No.19 Tahun 2020. Kebijakan ini bersifat wajib untuk dilaksanakan dan diserahkan kepada masing-masing kepala instansi dalam mengatur penerapan bekerja dari rumah bagi para aparatur sipil Negaranya dengan memperhatikan unit kerja masing-masing, jenis pekerjaan serta tujuan dari instansi. Mengenai aparatur sipil Negara, pemerintah telah mengaturnya dalam undang-undang republic Indonesia Nomor 5 tahun 2014. Dalam peraturan tersebut berisi tentang ketentuan umum, asas, prinsip, nilai dasar , kode etik, kode perilaku, fungsi, peran serta tugas aparatur sipil Negara.

Adanya peralihan system kerja ini berpengaruh terhadap kinerja aparatur sipil Negara dalam mencapai tujuan. Pengukuran kinerja dapat dilihat dari aspek keuangan, kepuasan pelanggan, operasi bisnis, kepuasan

pegawai, kepuasan komunitas dan juga waktu. Kinerja menjadi tolak ukur tingkat efisiensi dan efektivitas dalam mencapai sebuah tujuan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Menurut Baharuddin dan Nara, pengukuran kinerja dapat meningkatkan kualitas produk dan jasa yang dihasilkan, pelaksanaan serta implementasi terjamin akuntabilitasnya, meningkatkan praktik manajemen dan juga dapat membantu dalam merancang kebijakan untuk menyiapkan sebuah rekomendasi atau saran yang bermanfaat bagi adaptasi yang dilakukan akibat adanya sebuah kebijakan baru, rencana anggaran yang lebih efisien dan efektif, serta dapat menyiapkan sebuah akses atas produk atau jasa yang dihasilkan.

Cascio (2006: 35) memberikan saran bahwa dalam melaksanakan manajemen kinerja perlu menggunakan syarat-syarat sebagai berikut :

1. *Relevance*, factor yang diukur saling berhubungan dengan pekerjaan.
2. *Sensitivity* system yang digunakan dapat memberi perbedaan antara karyawan berprestasi dan tidak berprestasi.
3. *Reliability*, terpercaya, tolak ukur yang pasti, akurat, obyektif, konsisten serta stabil.
4. *Acceptability*, dapat dimengerti dan dipahami oleh pegawai.
5. *Practicality*, instrument yang digunakan tidak berbelit-belit.

Sebuah kinerja memiliki indicator agar target dari organisasi dapat tercapai. Hersey, Blanchard dan Johnson (dalam Wibowo, 2012:102) menentukan indicator kinerja sebagai berikut :

1. Adanya Tujuan yang akan dicapai

2. Standar yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui sebuah organisasi berhasil dan sukses dalam mencapai target
3. Umpan balik untuk melakukan sebuah evaluasi antar kinerja dan hasil
4. Adanya alat dan sarana yang menjadi penunjang pencapaian tujuan
5. Diperlukan kompetisi dan motif sebagai motivasi untuk mewujudkan tugas dan tanggung jawab.
6. Peluang atau kesempatan

Dalam penelitian terdahulu oleh Cicilia Tri Suci Rikhami yang mengidentifikasi dampak dari peralihan system bekerja dari rumah dengan judul Pengaruh *Work From Home* Terhadap Kinerja Guru SD Negeri Dengkek 01 Pati Selama Masa Pandemic Covid -19, penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dengan hasil yang menunjukkan adanya a dampak negative dan positif dari adanya bekerja dari rumah. Dampak negatifnya adalah membuat jenuh dalam bekerja dirumah 75%, mengurangi interaksi antara guru dan peserta didik 87,5%, menurunkan kualitas proses belajar mengajar 87,5%. Adapun dampak positifnya adalah bekerja lebih aman dari penyebaran virus covid-19 87,5% serta penggunaan biaya transportasi yang berkurang 75%.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi serta studi pustaka yang diperoleh dari lokasi penelitian di Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sulawesi Tenggara dengan jumlah informan ditentukan dengan cara *Purposive Sampling*. Data kemudian dianalisis

dengan pengumpulan data dari lokasi penelitian, kondensasi data dengan cara menyeleksi data untuk disederhanakan untuk kemudian di abstraksi, penyajian data dengan menentukan data-data penting sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan, dan terakhir adalah verifikasi untuk kemudian menentukan kesimpulan dari hasil penelitian.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan bekerja dari rumah di Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sulawesi Tenggara

Bidang pendidikan menjadi salah satu kebutuhan yang mendesak bagi pemerintah Sulawesi Tenggara. BP-PAUD & Dikmas Sultra adalah unit vertikalisasi yang bertugas dibidang pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat dengan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang menjadi penanggung jawabnya. Terdapat empat puluh aparatur sipil Negara yang bekerja dengan pembagian satu orang kepala kantor, satu orang kepala subbagian tatusaha, enam belas orang jabatan fungsional dan lainnya merupakan staf tata usaha.

Tujuan strategis BP-PAUD & Dikmas Sultra ialah mewujudkan pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang bermutu, berdaya saing nasional dan global dengan visi dan misi melaksanakan pengembangan model program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta melaksanakan peningkatan mutu pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

BP-PAUD & Dikmas Sultra menindaklanjuti instruksi Presiden Indonesia dalam surat edaran Menteri PAN-RB No.19 tahun 2020 tentang penyesuaian system kerja ASN dengan

melaksanakan bekerja dari rumah pada tanggal 20 Maret 2020 berdasarkan surat tugas kepala BP-PAUD & Dikmas Sultra. Pada awal pelaksanaan bekerja dari rumah diatur dalam sebuah jadwal yang tertera dalam surat tugas. Aparatur sipil Negara secara bergantian mempunyai jadwal berkerja dari rumah yang diatur dengan selisih satu hari. Sesuai dengan pedoman surat edaran Menteri PAN-RB yang mengatakan bahwa para pejabat instansi tetap melakukan pekerjaan secara langsung di kantor dengan bantuan beberapa staf dengan tetap memperhatikan program kesehatan dalam upaya pencegahan penyebaran virus covid-19.

Kepala subbagian tata usaha mengatakan bahwa bekerja dari rumah sudah pernah disosialisasikan sebelumnya d pertengahan tahun 2019 namun hanya sekedar wacana saja. Hal ini dilakukan guna menyesuaikan perkembangan teknologi menuju era digital 4.0. berawal dari wacana tersebut para aparatur sipil Negara dibekali fasilitas perangkat computer jinjing yang memungkinkan mereka dapat bekerja di mana saja. Dengan adanya pandemic covid-19 serta penyebarannya yang cukup mudah membuat bekerja dari rumah yang sebelumnya hanya sebuah wacana menjadi suatu hal yang bersifat wajib dilaksanakan dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona.

Dimasa-masa transisi penyesuaian system kerja bekerja dari rumah yang bersifat mendadak ini membuat para aparatur sipil Negara harus beradaptasi dengan keadaan baru. Dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang sangat dirasakan perubahannya ketika awal-awal bekerja dari rumah. Yang paling mengalami perubahan ialah dalam hal berkomunikasi, koordinasi dan proses pencapaian tujuan antar pegawai dalam melaksanakan tugas bersama terkait pengembangan mutu pendidikan anak usia dini dan masyarakat. Para aparatur sipil Negara

cukup merasakan dampaknya karena mereka harus mengalihkan segala kegiatan lapangan menjadi sebuah pertemuan tatap muka secara online (*video Convergence*). Berdasarkan keterangan salah satu pegawai jabatan fungsional BP-PAUD & Dikmas Sultra, beliau mengatakan bahwa mereka merasakan dampak dari bekerja dari rumah karena sebelumnya mereka harus banyak turun lapangan untuk mengobservasi lembaga-lembaga pendidikan yang menjadi target pengembangan mutu dan sejak adanya perintah bekerja dari rumah mereka harus lebih aktif menggunakan aplikasi zoom untuk bersosialisasi kepada lembaga-lembaga pendidikan tersebut.

Seiring berjalannya waktu semua hambatan yang dialami berhasil diatasi dengan cepat karena aparatur sipil Negara BP-PAUD & Dikmas Sultra menyadari akan tugas dan tanggungjawab mereka untuk mencapai target yang telah ditentukan. Para aparatur sipil Negara dengan cepat mampu beradaptasi dengan metode baru dalam pemberian mutu pendidikan bagi lembaga-lembaga pendidikan yang menjadi sasaran BP-PAUD & Dikmas Sultra dengan lebih memahami cara penggunaan aplikasi-aplikasi tatap muka. Meskipun dalam pelaksanaan kegiatan pemberian jaminan mutu pendidikan juga dilewati beberapa masalah dikarenakan lembaga-lembaga pendidikan yang menjadi target sulit dicapai baik dari segi transportasi maupun jaringan internet. Selain itu, lembaga pendidikan yang dituju rata-

rata pemahamannya masih dibawah rata-rata mwngwnl 8 standar nasional pendidikan, waktu pemberi materi yang relative singkat sehingga perlu kesabaran dan juga kreativitas para aparatur sipil Negara dalam pemberian materi, hambatan lainnya juga ialah masalah jaringan internet yang terkadang tidak bisa diprediksi kelambatannya.

Pengaruh kebijakan peralihan system kerja bagi aparatur sipil Negara balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sulawesi Tenggara

Bekerja dari rumah bagi aparatur sipil Negara BP-PAUD & Dikmas Sultra tidak menjadi masalah yang begitu berarti dalam mencapai tujuan seperti yang dikatakan kepala subbagian tata usaha bahwa system bekerja dari rumah sudah pernah disosialisasikan namun hanya sekedar wacana untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dan dari sosialisasi tersebut aparatur sipil Negara menerima fasilitas perangkat computer jinjing (laptop) yang memungkinkan mereka siap bekerja dimana saja.

Fokus pencapaian tujuan BP-PAUD & Dikmas Sultra berangkat dari beberapa isu-isu strategi. Dari isu-isu strategi yang ada BP-PAUD & Dikmas Sultra menetapkan target tahunan dalam perjanjian kierja tahun 2020. Adapun ringkasan perjanjian kinerjanya sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
Meningkatnya penjaminan	Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah dipetakan mutu pendidikannya	%	35

mutu PAUD dan Dikmas	Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah disupervisi mutu pendidikannya	%	35
	Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah difasilitasi mutu berdasarkan SNP	%	35
	Persentase Kab/Kota yang data pokok pendidikan anak usia dini akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	35

Dalam proses peralihan system kerja dengan bekerja dari rumah tidak membuat adanya perubahan terhadap target pencapaian yang telah ditentukan akan tetapi letak pelaksanaannya yang mengalami perubahan dikarenakan adanya instruksi untuk melakukan segala kegiatan baik itu kegiatan lapangan maupun kegiatan lainnya dilakukan dari rumah. Dari instruksi tersebut proses kegiatan jadi dialihkan dalam bentuk pertemuan konferensi secara online melalui aplikasi-aplikasi tatap muka yang tersedia.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh laporan pencapaian kinerja di masa pandemic covid-19 dengan system bekerja dari rumah yang menunjukkan bahwa target pencapaian berhasil dicapai bahkan melampaui dari target yang telah ditetapkan. Berikut informasi tingkat pencapaiannya :

1. Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah dipetakan mutu pendidikannya realisasi yang berhasil tercapai ialah 36%.
2. Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah disupervisi mutu pendidikannya realisasi yang tercapai ialah 36%
3. Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah

difasilitasi mutu pendidikannya berdasarkan SNP realisasi yang tercapai ialah 62%

4. Persentase kab/kota yang data pokok pendidikan anak usia dini akurat, terbarukan dan berkelanjutan realisasi yang tercapai ialah 86%.

Informasi tersebut menunjukkan bahwa tujuan strategi yang dilaksanakan oleh BP-PAUD & Dikmas Sultra ditahun 2020 tercapai sesuai dengan indicator pencapaian target bahkan melebihi target pencapaian meskipun pada tahun 2020 di Indonesia sudah terpapar oleh wabah pandemi covid-19 dan adanya peralihan system kerja dengan bekerja dari rumah. Selain tidak adanya perubahan terhadap target tahunan untuk adaptasi dengan peralihan system kerja jadwal jam kerja yang diberikan bagi aparatur sipil Negara tidak ada perubahan dengan kata lain jadwal bekerja sama dengan pegawai yang bekerja langsung dikantor. Absensi bagi aparatur sipilnnegara yang bekerja dari rumah dilakukan secara online dengan mengisi kehadiran menggunakan aplikasi yang sudah d sediakan dan dari laporan absensi tersebut aparatur sipil Negara dapat dikontrol kinerjanya.

Dari pemaparan pencapaian target BP-PAUD & Dikmas Sultra dapat dikatakan bahwa bekerja dari rumah tidak menjadi sebuah masalah yang berarti dalam mencapai tujuan dan tidak ditemukan adanya perubahan-perubahan target untuk menyesuaikan dengan penyesuaian system kerja yang baru ini. Aparatur Sipil Negara hanya perlu beradaptasi dengan cara baru dengan mulai aktif dalam menggunakan aplikasi tatap muka ketika melaksanakan tugasnya. Tidak ada pemberian motivasi khusus kepada aparatur sipil Negara karena sebagai aparatur sipil Negara mereka sudah menyadari tugas dan tanggung jawab mereka akan tetapi sebagai penunjang kinerja aparatur sipilnegera sudah diberikan fasilitas yang memadai seperti laptop dan juga bantuan kuota internet.

Factor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Bekerja Dari Rumah Di BP-PAUD & Dikmas Sultra

Tidak dapat pula dipungkiri para pegawai juga mengalami beberapa hambatan dalam proses penyesuaian system kerja bekerja darirumah terutama dalam hal koordinasi, sosialisasi, komunikasi dan juga pemahaman aplikasi tatap muka. Namun hal tersebut dapat disesuaikan dengan cepat karena para pegawai dituntut untuk melakukan berbagai cara dalam menjalankan tugasnya dalam mengembangkan kualitas pendidikannya dikarenakan adanya factor-faktor yang mempengaruhi. Adapun factor-faktor tersebut sebagai berikut :

- a. Factor Pendukung
 1. perencanaan kegiatan berlangsung sesuai jadwal yang ditentukan
 2. dalam mengikuti rakngaian kegiatan adanya satuan pendidikan yang proaktif

3. Kerjasama yang terjalin dengan badan akreditasi paud dan dikmas sulawesi tenggara baik
4. Pemerintah sangat mendukung penyelenggaraan segala kegiatan sehingga realisasi bisa melampaui target yang ditetapkan
5. Dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kegiatan
6. Adanya kesadaran dari daerah dan lembaga pendidikan dalam pemenuhan data guna membantu perencanaan program peningkatan mutu, perencanaan pelatihan dan perencanaan kurikulum

b. Aspek Penghambat

1. wabah pandemic yang mengakibatkan adanya peralihan system kerja yang membuat segala kegiatan dilakukan dengan proses daring (*video converence*)
2. sering terjadi masalah teknis pada aplikasi yang
3. Waktu pelaksanaan yang relative singkat yang berakibat kurangnya pemahaman kepada para peserta (ada batasan waktu dalam pertemuan menggunakan aplikasi)
4. Pemahaman lembaga sasaran bimtek masih dibawah rata-rata
5. letak satuan pendidikan yang sulit ditempuh dari segi transportasi dan juga jaringan internet.

KESIMPULAN

Dari pemaparan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan peralihan system kerja terhadap kinerja aparatur sipil Negara di BP-PAUD &

Dikmas Sultra tidak memberikan pengaruh yang cukup besar karena system bekerja dari rumah sudah pernah disosialisasikan sebelumnya dan juga adanya kesadaran para aparatur sipil Negara akan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam pelaksanaannya pula tidak luput dari sebuah hambatan-hambatan yang dirasakan aparatur sipil Negara BP-PAUD & Dikmas namun hambatan-hambatan tersebut berhasil diatasi sehingga target tahunan berhasil dicapai bahkan melampaui dari target pencapaian yang telah ditentukan.

<https://sultra.bps.go.id/statictable/2021/04/15/3045/jumlah-pegawai-negeri-sipil-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-sulawesi-tenggara-desember-2019-dan-desember-2020.html> diakses pada tanggal 19 November 2021

Baharuddin dan Nurdin Nara. Kompetensi Dan Komitmen Dalam Kinerja Pelayanan Publik. UPT Unhas Press : Makassar.

Wibowo, 2012. Manajemen Kinerja (cetakan keenam). PT RajaGrafindo Persada : Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan BNPB No. 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan tertentu Darurat bencana Wabah Penyakit.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) No.19 tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara.

James E. Anderson, Public Policy Making, (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984), cet. ke-3

Rokhani, Cicilia Tri Suci. 2020. Pengaruh Work From Home (WFH) terhadap Kinerja Guru SD Negeri Dengkek 01 Pati Selama Masa Pandemi Covid-19. EduPsyCouns.

Mungkasa, Oswar. 2020. Bekerja Dari Rumah (Working From Home/WFH): Menuju Tatanan Baru Era Pandemi COVID 19. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Cascio, Wayne F. 2006. Managing Human Resources. Colorado: Mc Graw-Hill.

Humas MENPAN-RB, "Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Dengan Kerja Di Rumah Bagi ASN" <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pencegahan-penyebaran-virus-covid-19-dengan-kerja-di-rumah-bagi-asn>, Diakses pada 28 Februari 2021.

<http://pauddikmassultra.kemdikbud.go.id/visi-dan-misi/> diakses pada tanggal 21 November 2021